

TINJAUAN BERBAGAI INDIKATOR SOSIAL*

Masri Singarimbun**

Abstract

This article delineates various indices: (a) The Physical Quality of Life Index (PQLI) and the Subjective Composite Index used by the Indonesian Central Bureau of Statistics for making comparisous with the 27 provinces of Indonesia; (b) a revised version of PQLI by adding fertility as a new component developed by Sajogyo and Abustam; (c) the Non-Physical Quality Index, used by the office of the Minister of Population and Environment, and (d) the Human Development Index (HDI), contained in the UNDP: *Human Development Report*, 1991 and 1992

A. Pendahuluan

Terdapat berbagai upaya untuk mengukur dan memonitor hasil pembangunan. Salah satu yang paling luas digunakan adalah kriteria ekonomi dengan menggunakan GNP dan GDP. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka dengan mudah dapat dilihat perkembangan sebuah negara dari waktu ke waktu. Kemudian diklasifikasikan negara-negara dengan pendapatan per kapita tinggi, sedang, dan rendah. Pada mulanya GNP dan GDP merupakan indikator penting dari modernisasi (Miles, 1985).

Namun strategi pembangunan setelah perang dunia kedua telah dikritik karena kegagalannya. Kenaikan laju pertumbuhan GNP ternyata berbarengan dengan pengangguran yang tidak dapat diatasi dan ketimpangan pendapatan memburuk, baik di dalam negeri maupun antarbangsa. Hasil pembangunan sesudah perang tidak dinikmati golongan miskin di dunia dan hal tersebut bertentangan dengan rasa

keadilan (Weaver, Jameson dan Blue, 1981: 79). Sehubungan dengan itu, senantiasa dikembangkan strategi-strategi pembangunan baru dan teknik-teknik yang lebih peka untuk mengukur kesenjangan sosial ekonomi tersebut.

Untuk mengukur pemerataan pendapatan digunakan Gini Ratio atau cara pengukuran lainnya, yakni perbedaan pendapatan antara golongan bawah, menengah, dan atas. Umpamanya, pemerataan diukur dengan berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh 40 persen kelompok berpendapatan rendah, berapa besarnya yang diterima oleh 40 persen berpendapatan menengah, dan berapa besarnya yang diterima oleh 20 persen berpendapatan tinggi. Mencuutnya proporsi yang diterima oleh golongan ekonomi yang lebih tinggi merupakan indikator penting dari proses pemerataan.

Di dalam tulisan ini dibicarakan: (a) Indeks Mutu Hidup (IMH)

* Revisi makalah Seminar Indeks Pembangunan Manusia, LIPI, Jakarta 11 Juni 1991.

** Masri Singarimbun, PhD adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan dosen Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra UGM.

berkomponen tiga, IMH berkomponen empat, dan Indikator Komposit Subyektif; (b) Indikator Nonfisik; dan (c) Indeks Pembangunan Manusia (IFM).

B. Indeks Mutu Hidup

Untuk memonitor kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, pengukuran-pengukuran berbagai aspek kehidupan dapat dilakukan. Di dalam buku *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, umpamanya, Biro Pusat Statistik memonitor perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek: 1. kependudukan, 2. pendidikan, 3. kesehatan, 4. gizi, 5. konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, 6. angkatan kerja, dan 7. perumahan dan lingkungan.

Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia juga menggali permasalahan ini melalui analisis mutu modal manusia. Di situ dianalisis hal-hal yang menyangkut pendidikan, ketenagakerjaan, keadaan rumah tangga, distribusi kekayaan dan kesehatan, dan lingkungan (Ananta dan Hatmadji).

Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Index (PQLI) yang dikembangkan pada tahun tujuh puluhan, yang mempunyai indeks komposit (a) kemampuan baca tulis (*literacy rate*), (b) harapan hidup sesudah berumur satu tahun (*life expectancy*), dan (c) angka kematian bayi (*infant mortality*) dalam waktu singkat mendapat popularitas dan digunakan secara meluas. Istilah "kualitas fisik" yang digunakan agaknya kurang tepat karena ada unsur yang tidak mengenai fisik tetapi itu tidak perlu dipersoalkan.

Melalui konsep ini terungkap bahwa berbagai negara dengan pendapatan per

kapita tinggi ternyata mempunyai Indeks Mutu Hidup (IMH) yang relatif rendah dan sebaliknya terdapat negara-negara dengan pendapatan per kapita relatif rendah tetapi mempunyai IMH yang cukup baik. Sebuah perbandingan yang klasik adalah Saudi Arabia dengan pendapatan per kapita tinggi tetapi mempunyai IMH yang rendah dan Sri Lanka dengan pendapatan per kapita rendah dengan IMH yang baik.

Di dalam buku *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, BFS menyajikan angka-angka Indeks Mutu Hidup (IMH) nasional dari propinsi-propinsi di Indonesia dan juga perbandingan antara pedesaan dan perkotaan tahun 1980 dan 1985. Terdapat kemajuan IMH dari tahun 1980 ke tahun 1985 dan IMH perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan.

IMH paling rendah untuk tahun 1985 adalah Timor Timur (50) dan tertinggi DKI Jakarta (87). Apabila diadakan pengelompokan maka yang tergolong rendah (di bawah 60) untuk pedesaan dan perkotaan adalah Timor Timur, NTB, dan Irian Jaya sedangkan yang tergolong tinggi (di atas 75) adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatra Utara, Daerah Istimewa Aceh, Lampung, dan Kalimantan Timur (Lihat Tabel 1).

Ferlu ditambahkan bahwa Sajogyo dan Abustam mencoba menambah satu komponen lagi, yakni Total Fertility Rate (TFR) ke dalam komponen Indeks Mutu Hidup, yang dinamakannya IMH-plus atau IMH berkomponen empat. Ternyata penambahan satu komponen tersebut menghasilkan perbedaan yang cukup berarti.

Sajogyo membuat pengelompokan berdasarkan besar kecilnya TFR yang sekaligus berkaitan dengan besar kecilnya selisih antara IMH dan

TABEL 1
INDEKS MUTU HIDUP MENURUT PROPINSI DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 1985 DAN 1985

Propinsi	Kota		Pedesaan		Kota Pedesaan	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985
1. Daerah Istimewa Aceh	78	83	62	76	64	77
2. Sumatra Utara	76	85	65	76	67	78
3. Sumatra Barat	71	75	56	69	57	70
4. Riau	75	78	54	71	59	73
5. Jambi	72	76	54	72	56	73
6. Sumatra Selatan	73	79	59	73	64	75
7. Bengkulu	77	82	57	75	59	75
8. Lampung	68	77	62	77	63	77
9. DKI Jakarta	72	87	62	87	71	87
10. Jawa Barat	62	76	50	65	53	67
11. Jawa Tengah	69	72	59	68	58	70
12. Daerah Istimewa Yogyakarta	79	85	66	79	69	81
13. Jawa Timur	67	75	54	65	57	67
14. Bali	71	81	56	69	59	72
15. Nusa Tenggara Barat	49	64	26	48	31	51
16. Nusa Tenggara Timur	80	76	52	65	51	66
17. Timor Timur	.	.	.	45	.	50
18. Kalimantan Barat	70	76	48	65	51	69
19. Kalimantan Tengah	72	84	62	74	63	72
20. Kalimantan Timur	65	81	54	65	57	74
21. Kalimantan Selatan	67	81	55	76	62	77
22. Sulawesi Utara	75	82	68	79	69	74
23. Sulawesi Tengah	71	95	53	64	56	71
24. Sulawesi Tenggara	64	73	52	67	54	67
25. Sulawesi Selatan	70	84	52	65	54	64
26. Maluku	74	75	56	69	57	72
27. Irian Jaya	70	78	46	58	51	59
Indonesia	69	81	54	69	57	71

Sumber: . BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, 1989, hal. 9.

IMH-plus yang menggunakan komponen tambahan tersebut. Pada lima propinsi yang mempunyai TFR terendah, IMH-plus sama atau lebih tinggi dari IMH (Lihat Tabel 2). Jadi, semakin rendah tingkat fertilitas semakin besar IMH-plus jika dibandingkan dengan IMH. Sebaliknya,

propinsi-propinsi dengan TFR yang lebih tinggi, IMH-plus lebih rendah dari IMH. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa kesuksesan program keluarga berencana pada propinsi tertentu menyumbang terhadap perbaikan indeks mutu hidup (berkomponen empat).

TABEL 2
PENGELOMPOKAN PROPINSI MENURUT PERINGKAT TFR (PEDESAAN)
DAN SELISIH (ANGKA) ANTARA IMH-PLUS (PEDESAAN TAHUN 1980)

Kelompok	Propinsi	TFR (Pedesaan)	Selisih (IMH-Plus dikurangi IMH)
1. Pertama	1. Jawa Timur	3630	+ 5
	2. Yogyakarta	3500	+ 2
	3. Bali	4052	+ 2
	4. Jawa Tengah	4475	+ 1
	5. Kalimantan	4750	0
	(Indonesia)	(4850)	(0)
2. Kedua	1. Sulawesi Selatan	5045	- 4
	2. Jawa Barat	5175	-1
	3. Kalimantan Timur	5265	-2
	4. Sulawesi Utara	5285	-6
	5. Aceh	5305	-4
	6. NTT	5615	-2
	7. Riau	5615	-4
	8. Jambi	5655	-4
	9. Kalimantan Barat	5730	-2
3. Ketiga	1. Lampung	5845	-7
	2. Sulawesi Tenggara	5875	-5
	3. Sumatra Barat	5935	-5
	4. Sumatra Selatan	5935	-6
	5. Kalimantan Tengah	5995	-7
	6. Sulawesi Tengah	6050	-5
	7. Bengkulu	6300	-7
	8. Maluku	6320	-7
	9. Sumatra Utara	6395	-10
	10. NTB	6720	-3

Sumber: Sajogyo, 1984

Di samping indikator komposit obyektif pada Tabel 1, BPS juga menyajikan indikator komposit subyektif. Analisisnya didasarkan pada data Susenas 1982 dan 1986, menyangkut persepsi masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan rumah tangga selama periode tiga tahun, yakni 1979-1982 dan 1983 dan 1983-1986.

Kepala rumah tangga sampel diminta pendapatnya tentang perkembangan sembilan masalah pokok selama tiga tahun sebelum pencacahan, meliputi:

1. kemudahan menyekolahkan anak di SD,
2. kemudahan menyekolahkan anak di SMTP,
3. keadaan perayaan hari lebaran,
4. kemudahan menggunakan fasilitas transportasi,
5. ketertiban/keamanan,
6. kesehatan anggota rumah tangga,
7. fasilitas tempat tinggal,
8. keadaan ekonomi rumah tangga, dan
9. perbandingan penghasilan/penerimaan dan pengeluaran.

TABEL 3
PROPINSI MENURUT SKOR KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA 1979-1982

Propinsi	Skor	Peringkat
1. Daerah Istimawa Aceh	4.98	5
2. Sumatra Utara	5.25	17.5
3. Sumatra Barat	5.02	7
4. Riau	5.44	22.5
5. Jambi	5.21	15
6. Sumatra Selatan	5.00	6
7. Bengkulu	4.12	1
8. Lampung	4.88	3.8
9. DKI Jakarta	4.88	3.5
10. Jawa Barat	5.16	12
11. Jawa Tengah	5.19	13
12. DI Yogyakarta	5.32	21
13. Jawa Timur	5.30	20
14. Bali	5.22	16
15. Nusa Tenggara Barat	5.13	10.5
16. Nusa Tenggara Timur	4.79	2
17. Timor Timur	5.20	14
18. Kalimantan Barat	5.11	9
19. Kalimantan Tengah	5.13	10.5
20. Kalimantan Timur	5.08	8
21. Kalimantan Selatan	5.28	19
22. Sulawesi Utara	5.57	26
23. Sulawesi Tengah	5.44	22.5
24. Sulawesi Tenggara	5.55	25
25. Sulawesi Selatan	5.72	27
26. Maluku	5.54	24
27. Irian Jaya	5.25	17.5

Keterangan: Skor artinya rata-rata banyaknya aspek kesejahteraan yang dirasakan baik oleh rumah tangga.

Sumber: BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, 1989, hal. 6.

Secara statistik enam variabel terakhir (no. 4-9) dapat dianggap sebagai faktor yang dominan untuk menentukan pendapat kepala rumah tangga mengenai kelompok kesejahteraan keluarga yang ditanyakan. Kemungkinan skor paling kecil adalah 0 sedangkan paling besar adalah 6. Indikator komposit subyektif 0 berarti secara rata-rata rumah tangga tidak merasakan kesejahteraan selama kurun waktu tiga tahun tersebut; skala indeks 6 berarti bahwa secara rata-rata rumah tangga merasakan kesejahteraan secara sempurna dalam kelompok bidang tersebut.

Hasilnya menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan, dengan skor 5,72, yang paling merasakan adanya kesejahteraan. Sebaliknya Bengkulu mempunyai skor indeks komposit terendah, sebesar 4,12 (Lihat Tabel 3).

C. Indikator Nonfisik

Manusia dan kehidupannya sangat kompleks sehingga tidaklah mudah untuk mengukur kualitas kehidupannya. Berbagai model dan kombinasi model dapat dikembangkan, umpamanya: (1) model-model ekonomi (*economic models*) yang di antaranya sudah tercakup dalam pembahasan di atas, (2) model-model psikologi (*psychological models*), (3) model-model lingkungan (*environmental models*), (4) model-model politik (*political models*), (5) model-model sosiologi (*sociological models*), dan (6) model-model geografi manusia (*human geographical models*) (Beesley dan Russwurm, 1989).

Tentunya pemilihan model disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi setempat. Rasanya tidak mungkin dan tidak perlu untuk menggunakan semua model tersebut.

Apabila model-model yang digunakan oleh Indonesia di atas, yang tercermin dalam hasil BPS dan Sajogyo, dibandingkan dengan model yang dipakai Filipina, maka indikator-indikator yang digunakan oleh Filipina sedikit lebih luas karena unsur-unsur ketimpangan pemilikan tanah (no. 5), masalah-masalah peradilan, dan partisipasi politik juga dimasukkan.

Bagi Filipina, Development Academy of the Philippines (1975) menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: (1) *Health and Nutrition*, (2) *Learning*, (3) *Income and Consumption*, (4) *Employment*, (5) *Non-human Productive Resources*, (6) *Housing, Utilities, and The Environment*, (7) *Public Safety and Justice*, (8) *Political Values*, (9) *Social Mobility* (masih eksperimen). Datanya ada yang dikumpulkan bulanan, kuartalan, tahunan, dua tahun sekali dan pada tiap pemilihan umum.

Perlu ditambahkan bahwa Lokakarya Indikator Sosial yang diselenggarakan BPS pada tanggal 14-15 April 1980 menyarankan perbaikan berbagai indikator. Pada perumusan masalah dikemukakan bahwa dewasa ini dirasakan kebutuhan untuk menyempurnakan penyajian indikator-indikator tersebut sehingga tergambar saling hubungan antara aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan keamanan. Untuk berbagai sektor disarankan penambahan data dan Kamtibnas serta data sosial tambahan mendapat perhatian. Saran-saran perbaikan menyangkut indikator-indikator berikut.

1. Kependudukan dan Tenaga Kerja
Penambahan data (1-8)
2. Keluarga Berencana
Penambahan data (1-8)

3. Kesehatan dan Gizi
Penambahan data (1-9)
4. Pendidikan dan Kebudayaan
Penambahan data (1-11)
5. Kamtibmas
 1. Jumlah pelaku kejahatan menurut umur.
 2. Kemampuan penyelesaian perkara (*Clearance Rate*).
 3. *Crime total, crime index rate, crime rate, crime clock, police employment rate.*
 4. Tindak pidana menurut pelakunya (anak-anak, pemuda, dewasa, dsb.)
 5. Pelanggaran lalu lintas perlu dipisahkan.
6. Kesejahteraan Sosial dan Agama
Penambahan data:
 1. Jumlah keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.
 2. Jumlah anak terlantar dan definisinya.
 3. Jumlah gelandangan supaya dihilangkan.
 4. Anak cacat usia 7 - 12 tahun.
 5. Indikator stabilitas keluarga (nikah, talak, rujuk).
 6. Jumlah perceraian menurut sebab-sebabnya.
 7. Jumlah nikah, talak, dan rujuk di lingkungan pemeluk agama selain Islam.

Perkembangan yang penting di Indonesia adalah dikembangkannya konsep Kualitas Non Fisik (KNF) sejak 1983 oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, kualitas hidup terbagi atas Kualitas Fisik dan Kualitas Nonfisik. Titik-tolak konsep KNF adalah "rumusan GBHN mengenai manusia seutuhnya yang menjadi tujuan akhir pembangunan nasional, yaitu yang serba berkeeseimbangan dan selaras dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan

bangsa-bangsa lain, dan dengan alam lingkungan" (Dahlan, 1990: 2). Dengan demikian, diidentifikasi indikator-indikator berikut.

- a. *Kualitas kepribadian.* Ciri KNF pokok yang perlu ada pada setiap manusia (individu) pembangunan adalah kecerdasan, kemandirian, kreativitas, ketahanan mental, keseimbangan emosi-rasio.
- b. *Kaalitas bermasyarakat.* KNF yang diperlukan dalam keselarasan hubungan dengan sesama manusia, umpamanya kesetiakawanan (solidaritas), keterbukaan.
- c. *Kualitas berbangsa.* Tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara yang semartabat dengan bangsa-bangsa lain.
- d. *Kualitas spiritual.* KNF dalam hubungan dengan Tuhan: religiusitas dan moralitas.
- e. *Wawasan lingkungan.* KNF yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh generasi bangsa.
- f. *Kualitas kekaryaan.* KNF yang diperlukan untuk mewujudkan aspirasi dan potensi diri dalam bentuk kerja nyata guna menghasilkan sesuatu dengan mutu sebaik-baiknya.

Sejak 1984 pengembangan KNF telah dilaksanakan dengan melakukan berbagai penelitian; antara lain dilakukan pengujian konsep, relevansi ciri KNF, dan pengukuran ciri tertentu pada kelompok tertentu (Dahlan, 1990).

D. Indeks Pembangunan Manusia

Human Development Report dikeluarkan UNDP pada tahun 1990, edisi revisi terbit tahun 1991 dan 1992. Pada edisi 1991 dikatakan bahwa kurangnya komitmen politik, dan bukan kekurangan sumber dana, merupakan

penyebab keterlambatan manusia. Laporan tersebut, dengan demikian, menekankan analisisnya pada pembiayaan pembangunan manusia. Kesimpulannya adalah bahwa pembiayaan berbagai negara dewasa ini adalah salah arah dan digunakan secara tidak efisien. Sekiranya hal tersebut dapat diluruskan maka lebih banyak dana akan tersedia untuk mempercepat kemajuan manusia.

Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah memperluas pilihan-pilihan dan membuat pembangunan lebih demokratis dan partisipatoris. Ke dalam pilihan-pilihan tersebut tercakup pendapatan dan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan fisik yang bersih dan aman.

Pembangunan manusia memerlukan pertumbuhan ekonomi karena tanpa itu tidak mungkin tercipta kesejahteraan secara berkelanjutan. Namun kebijaksanaan yang ketat diperlukan untuk memadukan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan pembangunan manusia. Seyogianya pertumbuhan adalah: (a) partisipatoris, yang memberikan peluang bagi inisiatif perorangan; (b) didistribusikan secara baik, yang menguntungkan semua lapisan; (c) berkelanjutan karena peningkatan produksi masa depan memerlukan pengorbanan sekarang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) menggabungkan pendapatan nasional dengan dua indikator sosial, yakni melek huruf orang dewasa dan harapan hidup. Jadi bedanya dengan Indeks Mutu Manusia di atas adalah dimasukkannya pendapatan nasional. Untuk penyederhanaan angka kematian hayati dikeluarkan karena tokoh sudah tercakup juga oleh lamanya harapan hidup.

Tabel 4 memberikan gambaran tentang peringkat berbagai negara di dunia, yang disarikan dari dua tabel yang terdapat pada laporan UNDP 1992. Semuanya terdiri atas 160 negara, 33 negara industri dan 127 negara berkembang.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa beberapa negara industri mempunyai peringkat IPM yang lebih rendah daripada beberapa negara yang sedang berkembang. Portugal, Albania, dan Rumania berturut-turut termasuk ke dalam peringkat 39, 49, dan 60, sedangkan Barbados, Hong Kong, dan Korea Selatan berturut-turut termasuk ke dalam peringkat 20, 24, dan 34. Delapan negara industri mempunyai peringkat di atas 30 sedangkan empat negara sedang berkembang mempunyai peringkat di bawah 30.

Dengan nilai IPM sebesar 0,491, Indonesia termasuk ke dalam peringkat 98 dari 160 negara di dunia. Negara-negara tetangga di dalam lingkungan Asean -- Brunei Darussalam (Peringkat 41), Malaysia (P 51), Thailand (P 69), Filipina (P 80) -- mempunyai peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia.

Status wanita mendapat perhatian yang penting dalam Laporan UNDP 1991 dan UNDP 1992. Di dalam laporan tersebut dibuat apa yang dinamakan *gender sensitive HDI*, yakni IPM dengan memperhitungkan selisih antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Kalau tadinya Jepang mempunyai peringkat nomor satu maka dengan menggunakan *gender sensitive HDI* tersebut peringkatnya jauh menurun. Dari 30 negara yang diambil, Jepang jatuh menjadi peringkat 18 karena selisih antara IPM laki-laki dan IPM perempuan cukup besar.

TABEL 4
PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
BAGI NEGARA-NEGARA INDUSTRI DAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

	1990 Peringkat IPM	1990 Nilai IPM
<i>Negara-negara industri:</i>		
Jepang	1	0,982
Canada	2	0,981
Sweden	5	0,976
Inggris	10	0,962
Denmark	13	0,953
Selandia Baru	17	0,947
Belgia	16	0,950
Israel	18	0,939
Italia	21	0,922
Portugal	39	0,850
Albania	49	0,791
Rumania	60	0,733
<i>Negara-negara berkembang:</i>		
Barbados	20	0,927
Hong Kong	24	0,913
Korea Selatan	34	0,871
Malaysia	51	0,789
Thailand	69	0,685
Afrika Selatan	70	0,674
Turki	71	0,671
Sri Langka	76	0,651
RRC	79	0,612
Filipina	80	0,600
Indonesia	98	0,491
Viet Nam	102	0,464
Pakistan	120	0,305
India	121	0,297
Guinea	160	0,052

Sumber: UNDP, 1992: 19-20.

Catatan: Tabel di atas merupakan ringkasan dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Sebaliknya Swedia melejit menjadi peringkat satu, Norwegia peringkat dua, dan Finlandia peringkat tiga (UNDP 1992: 21).

Berhubung data tidak diperoleh untuk semua negara maka *gender sensitive* HDI hanya dibuat untuk 33 negara (UNDP, 1992). Untuk itu, dibandingkan data mengenai laki-laki dan perempuan, yang meliputi angka harapan hidup, melek huruf orang dewasa, lamanya pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan tingkat upah.

Indeks tersebut menunjukkan bahwa bagi negara-negara industri, perbedaan antara laki-laki dan perempuan sudah menciut dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun perbedaan masih besar dalam

partisipasi angkatan kerja dan upah. Oleh karena itu, perempuan memperoleh proporsi yang lebih kecil daripada pendapatan nasional. Di Jepang, perempuan hanya memperoleh sepertiga dan di Inggris, Canada, dan Amerika Serikat mereka mendapat separo dari rata-rata pendapatan per kapita laki-laki. Di Norwegia, Finlandia, dan Deumark perempuan mendapat dua pertiga dari rata-rata pendapatan per kapita laki-laki (UNDP, 1992: 21-22).

Indeks lainnya yang sudah diperdebatkan orang adalah Indeks Kebebasan Manusia (*The Human Freedom Index*) yang dikembangkan oleh Charles Humana (UNDP 1991). Indeks tersebut menggunakan 40 indikator, antara lain: hak bepergian di

TABEL 5
GENDER-SENSITIVE HDI

	<i>Gender-sensitive</i> HDI	Persentase HDI pr. thd HDI ll.
Swedia	0,938	96,16
Prancis	0,899	92,72
Deumark	0,879	92,20
Australia	0,879	90,48
USA	0,842	86,26
Inggris	0,819	85,09
Itali	0,772	83,82
Jepang	0,761	77,56
Hong Kong	0,649	71,10
Singapura	0,601	70,87
Korea Selatan	0,571	65,53
Sri Langka	0,518	79,59
Filipina	0,472	78,67
Myanmar	0,285	74,07
Kenya	0,215	58,60

Tabel disederbanakan, sumber: *Human Development Report*, UNDP, 1992, hal. 21.

dalam negeri sendiri, ke luar negeri, mengajarkan ide dan mendapatkan informasi; bebas dari kerja paksa atau pekerjaan anak-anak, siksaan atau paksaan, hukuman mati, seursor media massa; kebebasan atas oposisi politik, persamaan politik dan hukum bagi wanita, kebebasan surat kabar, kebebasan serikat pekerja; hak atas peradilan terbuka, atas proses pengadilan yang cepat; hak pribadi atas perkawinan antarsuku, antaragama atau perkawinan sipil, homoseks antara orang dewasa yang sepakat, menjalankan agama, menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Untuk Indeks Kebebasan Manusia, Indonesia termasuk ke dalam peringkat yang rendah (nilai 5 pada *low freedom ranking*), setara dengan Kuba, Korea Utara, Viet Nam, Pakistan, dan Zaire (Lihat *Suara Pembaruan*, 24 Mei 1991). Kecaman terhadap indeks tersebut adalah biasanya terhadap nilai-nilai Barat dan hak azasi manusia. Dimasukkannya hak untuk berhomoseks banyak dikritik orang.

The human expenditure ratio adalah persentase dari pendapatan nasional yang dialokasikan untuk *human priority concerns* dan ini perlu mendapat perhatian dalam upaya pembangunan manusia. Peringkat tinggi bagi *human expenditure ratio* adalah yang besarnya di atas 5 persen, peringkat menengah antara 3 persen dan 5 persen, dan peringkat rendah di bawah 3 persen. Malaysia (6,3 persen) dan Moroko (6,3 persen) termasuk tinggi, Singapura (4,3 persen), Brazilia (4,2 persen), dan Korea (3,7 persen) termasuk sedang. Selanjutnya India (2,5 persen), Thailand (2,5 persen), Filipina (2,4 persen), dan Pakistan (0,8 persen) termasuk rendah tetapi yang paling

rendah adalah Indonesia (0,6 persen) (UNDP 1991:41).

E. Penutup

PPT-LIPI telah membuat IPM untuk 26 propinsi di Indonesia berdasarkan data tahun 1985. Juga telah diadakan analisis perubahan dari waktu ke waktu (1971-1980-1985) untuk beberapa propinsi. Dari hasil penelitian PPT-LIPI di beberapa propinsi tentu akan diperoleh berbagai hal yang menarik dan penting berkenaan dengan penggunaan dan kemungkinan elaborasi konsep IPM.

Sekiranya data tersedia tentu menarik pula untuk diketahui perbedaan IPM laki-laki dan IPM perempuan sehingga diketahui *gender sensitive* HDI. Akan sangat informatif sekiranya dapat diketahui perbedaan antarpropinsi.

Juga menarik untuk diketahui apakah ada perbedaan *human expenditure ratio* antarpropinsi. Alokasi ini sangat penting karena tidak mustahil kita terlalu cenderung menilai tinggi apa yang dinamakan kemandirian. Tidak mustahil bagi orang miskin bahwa yang dinamakan "kemandirian" itu adalah "malapetaka" karena bantuan atau subsidi dihentikan untuk mereka atau tidak diadakan untuk mereka, sementara orang bicara tentang pemerataan dan perbaikan distribusi pendapatan. Selanjutnya persoalan pemerataan pelayanan publik perlu senantiasa mendapat perhatian sebab subsidi pemerintah cenderung diarahkan ke kota dan kepada golongan menengah atas (Effendi, 1990: 223).

Indeks Kebebasan Manusia berguna untuk dikembangkan tetapi jangan terikat kepada apa yang telah dibuat oleh Humana, bahwa akibatnya tidak

untuk dibandingkan secara internasional tidaklah menjadi soal.

Rasa aman dan rasa tertib merupakan kebutuhan yang penting. Kiranya indikator tersebut (Kamtibnas) perlu dimasukkan untuk perbandingan antarpropinsi di Indonesia walaupun tidak dapat dibandingkan secara internasional.

Akhir kata, berbagai indikator yang dikemukakan di atas dapat dipertimbangkan untuk digunakan di mana perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris dan Sri Harijati Hatmadji, ed. 1985. *Mutu modal manusia; suatu analisis pendabuluan*. Jakarta: Lemhaga Demografi FE-UI dan Biro Pusat Statistik.
- Beesley, K.B. dan L.H. Russwurm. 1984. "Social indicators and quality of life research: toward synthesis", *Environments*, 20(1): 22-39.
- Dahlan, M. Alwi. 1990. "Mencari ukuran kualitas nonfisik penduduk", makalah untuk *Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu- Ilmu Sosial (HIPIS)*, Yogyakarta, 16-21 Juli.
- Development Academy of the Philippines. 1975. *Measuring the quality of life: Philippine Social Indicators*. Manila.
- Effendi, Sofian. 1990. "Kebijaksanaan publik berwawasan pemerataan", dalam A.Z. Akbar, *Beberapa aspek pembangunan orde baru: esei-esai dari Fisipol Bulaksumur*. Solo: Ramadhani, hal. 219-236.
- Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1990. *Indikator kesejahteraan rakyat 1989*. Jakarta.
- Lokakarya Indikator Sosial, Jakarta, 14-15 April 1980. *Laporan penyelenggaraan*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Miles, Ian. 1985. *Social indicators for human development*. London: Frances Pinter.
- Sajogyo. 1984. "Indeks mutu hidup", *Prisma*, 13(11): 9-19.
- United Nations Development Programme. 1991. *Human development report 1991*. New York: Oxford University Press.
- . 1992. *Human development report 1992*. New York: Oxford University Press.
- Weaver, J.H., K.P. Jameson dan R.N. Blue. 1981. "Pertumbuhan dan keadilan: apakah kedua-duanya dapat dicapai bersama?", dalam Thee Kian Wie, ed., *Pembangunan ekonomi dan pemerataan*. Jakarta: LP3ES, hal. 79-95.